

BUKU

I

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY KOTA TANGERANG



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



DAFTAR ISI

I. Analisis Kondisi Masa Depan	4
1.1. Analisis tren dan perubahan atau perkembangan kota	4
1.2. Analisis perilaku dan harapan masyarakat dan stakeholder daerah.	4
1.3. Analisis daya saing kota dibandingkan dengan kota-kota lainnya dan kota lain sebagai pesaing di tingkat internasional.	4
1.4. Analisis kelembagaan dan pemerintah daerah yang relevan dengan kebutuhan seluruh stakeholder yang ada.	4
II. Analisis Kesiapan Daerah	6
2.1. Struktur	6
2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia.....	6
2.1.2 Kualitas Sumber Daya Pemerintahan	7
2.1.3 Kapasitas Keuangan Daerah.....	10
2.2. Infrastruktur	11
2.2.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah	11
2.2.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah.....	12
2.2.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah.....	13
2.3. Suprastruktur (Kebijakan & Kelembagaan)	14
2.3.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah.....	14
2.3.2 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah.....	15
2.3.3 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah.....	16
III. Analisis Kesenjangan Strategis Daerah	20
IV. Analisis Pembangunan Smart City.....	26
4.1 Analisis Indikator Smart City.....	26
Smart Governance.....	26
Smart Ekonomi	31
Smart Living.....	34
Smart Society	36
Smart Environment.....	38
4.2 Strategi Pembangunan Smart City.....	41
V. Visi Pembangunan Smart City.....	43
5.1. Visi, Misi Rencana Pembangunan Kota Tangerang.....	44

5.2 Tujuan Penataan Ruang Kota Tangerang	52
A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Tangerang..	53
B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kota Tangerang.....	54
C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota Tangerang..	56
D. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota Tangerang.....	58
5.2 Visi Pembangunan Smart City Kota Tangerang	60
VISI	61
Sasaran	61
Smart Governance.....	62
Smart Branding	63
Smart Economy.....	64
Smart Living.....	64
Smart Society.....	65
Smart Environment.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Kualitas SDM Daerah	6
Tabel 2 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan.....	7
Tabel 3 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah.....	10
Tabel 4 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah.....	11
Tabel 5 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah	12
Tabel 6 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah.....	13
Tabel 7 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah	14
Tabel 8 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah.....	16
Tabel 9 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah	16
Tabel 10 Penilaian Kesiapan Smart City Kota Tangerang.....	20
Tabel 11 Analisis Kesenjangan Smart City.....	22
Tabel 12 SWOT Indikator Smart Governance.....	29
Tabel 13 SWOT Indikator Smart Economy.....	32
Tabel 14 SWOT Indikator Smart Living.....	35
Tabel 15 SWOT Indikator Smart Society.....	37
Tabel 16 SWOT Indikator Smart Society.....	40
Tabel 17 Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018.....	44
Tabel 18 Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018	47
Tabel 19 Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Visi Smart City Kota Tangerang	61
---	----

I. Analisis Kondisi Masa Depan

Sebelum mulai menyusun Masterplan Smart City, daerah harus mengawalinya dengan melakukan analisis *outlook* atau analisis masa depan suatu daerah. Analisis tersebut paling tidak meliputi:

1.1. Analisis tren dan perubahan atau perkembangan kota

Analisis outlook atau analisis masa depan kota tangerang tertuang dalam dokumen atau rencana pembangunan dan rencana tata ruang yaitu

- Visi RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 adalah “TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”
- Tujuan Penataan Ruang Kota Tangerang : Terwujudnya Kota Tangerang sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan berskala regional berwawasan lingkungan dan budaya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur)”

1.2. Analisis perilaku dan harapan masyarakat dan stakeholder daerah

Analisis perubahan perilaku dan harapan masyarakat yang mempengaruhi harapan terhadap kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau stakeholder lainnya. Adapun perilaku dan harapan masyarakat dan stakeholder daerah kota tangerang masyarakat menginginkan adanya kemudahan dalam pengurusan pelayanan publik. perilaku masyarakat terkait pelayanan publik adalah keterbukaan informasi dan pelayanan publik serta makin banyaknya masyarakat yang memahami perkembangan teknologi kemudian memanfaatkan kemudahan tersebut.

1.3. Analisis daya saing kota dibandingkan dengan kota-kota lainnya dan kota lain sebagai pesaing di tingkat internasional.

Daya saing kota tangerang dibandingkan dengan beberapa daerah/kota lain atau kota di luar negeri yang akan menjadi benchmark dan tolok ukur keberhasilan pembangunan antara lain :

- Kota Tangerang menjadi pintu gerbang hubungan internasional yang didukung oleh keberadaan Bandara Soekarno Hatta. Kapasitas penerbangan yang padat mendorong pergerakan orang, barang dan jasa antar kawasan, baik lokal (nasional), kawasan regional (asean), dan kawasan internasional, sehingga peluang investasi sangat terbuka di Kota Tangerang, khususnya sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor industri pengolahan.

- Kota Tangerang sebagai wilayah yang memiliki sistem perkotaan yang terintegrasi dengan daerah lain khususnya kawasan Jabodetabek, memberikan kesempatan bagi Kota Tangerang untuk menangkap peluang terjadinya stagnansi pembangunan di kota-kota sekitarnya khususnya Kota Jakarta. Pengembangan pusat bisnis, pusat pelayanan publik, pengembangan transportasi modern sangat potensial untuk dikembangkan.
- Kota Tangerang sebagai kota yang paling maju di Provinsi Banten menjadi daerah transit arus orang dan barang menuju Jakarta. Kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan pusat perbelanjaan, wisata belanja, pusat kuliner dan perhotelan.
- Kedudukan dan peran Kota Tangerang dalam konstelasi Jabotabek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran Jakarta sebagai ibukota negara dan secara regional merupakan bagian dari Kota Megapolitan Jabodetabekjur.
- Penetapan Kota Tangerang sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu dalam RTRW Nasional yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala nasional.
- Penetapan Kota Tangerang sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi dalam RTRW Provinsi Banten yang diprioritaskan pengembangannya dalam skala Provinsi Banten.

1.4. Analisis kelembagaan dan pemerintah daerah yang relevan dengan kebutuhan seluruh stakeholder yang ada.

Pemerintah Kota Tangerang perlu menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang relevan dengan keadaan di masa yang akan datang baik dalam hal tren perubahan kota/daerah, perilaku dan harapan masyarakat dan stakeholder lainnya, perkembangan kota lain serta strategi kota/daerah di dalam kancah persaingan atau kerjasama global dengan kota-kota di luar negeri. Tersedianya

- Rencana Tata ruang sebagai acuan perencanaan dan pembangunan spasial
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam pembangunan
- Masterplan Teknologi, Informasi dan Komunikasi
- Tangerang LIVE memudahkan pelayanan kepada masyarakat

II. Analisis Kesiapan Daerah

2.1. Struktur

Analisis struktur daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan sebuah daerah. Unsur-unsur tersebut adalah:

2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Analisis kualitas sumber daya manusia daerah dilakukan untuk mengukur tingkat kapasitas masyarakat di daerah dalam menerima konsep smart city. Beberapa informasi yang perlu diketahui di dalam analisis ini adalah tingkat literasi masyarakat terhadap smart city yang nanti akan sangat membutuhkan partisipasi aktif dan positif dari masyarakat di daerah. Berikut adalah hasil analisis yang dilakukan untuk mengukur kondisi masyarakat di daerah dalam menghadapi era smart city di masa depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Analisis Kualitas SDM Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Jumlah komunitas minat bakat/hobbie/kreatif di daerah	Terdapat 853 lembaga/organisasi	√		
2	Adanya komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK di daerah	Terdapat komunitas antara lain Relawan TIK, komunitas IT-Studying, dsb	√		
3	Adanya digital startup di daerah	Contoh adanya DILO Kota Tangerang		√	
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	Terdapat 30 Perguruan Tinggi	√		
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	Tahun 2017 tersedia slot sebanyak 26 mahasiswa penerima beasiswa		√	

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
6	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	Jumlah tindak pidana tahun 2016 sebesar 519			√
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	Jumlah tindak kejahatan tahun 2016 sebanyak 1.946			√
8	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	Adanya aksi vandalisme		√	
9	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	-adanya tawuran antar pelajar		√	

2.1.2 Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program smart city dimana di dalamnya dituntut adanya integrasi dan interoperabilitas didalam proses bisnis pemerintah daerah. Disamping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak dari smart city, kesiapan pemerintah daerah di dalam melaksanakan smart city merupakan factor kunci keberhasilan smart city. Sehingga di dalam analisis terdapat lebih banyak butir-butir informasi yang perlu ditelaah lebih lanjut di dalam analisis kesiapa pemerintah daerah. Analisis terhadap kualitas sumber daya pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	Sebanyak 674 jiwa	√		
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika			√	

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
3	Jumlah relawan TIK di daerah	80 orang tenaga sukarela		√	
4	Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai			√	
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai			√	
6	Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai			√	
7	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai			√	
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	115 sistem informasi	√		
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan		√		
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	Jaringan LAN/ WAN terdapat di 41 gedung pemerintahan	√		
11	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan	Tersedia disemua SKPD	√		
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service)	Capaian tingkat pelayanan	√		

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
	untuk kepentingan pemerintahan	media center sebesar 60%			
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Ada	√		
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperabel	Ada	√		
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperabel	Ada	√		
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperabel	Ada	√		
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel	Ada	√		
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel	Ada	√		
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel	Ada	√		
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperabel	Ada	√		

2.1.3 Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis terhadap kapasitas keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan smart city. Melalui analisis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkirakan alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan dan keuangan yang dapat dialokasikan untuk program smart city. Disamping itu, melalui analisis ini, Pemerintah Daerah juga didorong untuk dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program smart city. Analisis terhadap kapasitas keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	43 %		√	
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	1.171.968 Juta Rupiah	√		
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah	42 %		√	
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	1.185.774 Juta Rupiah	√		
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2017		√		
6	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2018		√		

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
7	Jumlah program pembangunan untuk mendukung smart city di daerah	Tangerang LIVE	√		
8	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	106.409.500 US\$	√		
9	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung smart city		√		

2.2. Infrastruktur

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur daerah dilakukan untuk mengukur kesiapan kondisi infrastruktur daerah yang dikategorikan ke dalam tiga dimensi, yaitu:

2.2.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dilakukan untuk mengukur kondisi sarana dan prasarana fisik daerah yang menjadi titik tolak dalam pembangunan smart city daerah. Dengan mengetahui posisi saat ini dalam hal infrastruktur fisik, maka pemerintah daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi smart city daerah. Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 4 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	1.356,89 km	√		

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal		√		
3	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik				
4	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik				
5	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Ada	√		
6	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Ada	√		
7	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	46 %	√		
8	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik		√		

2.2.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program smart city, mengingat di dalam konsep smart city, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari smart city. Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 5 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	Ada	√		
2	tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat	Ada	√		
3	jumlah lokasi wireless untuk publik	Ada	√		
4	persentase rumah tangga yang terlayani listrik	264.573 Rumah Tangga	√		
5	jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	Ada	√		
6	jumlah sekolah yang memiliki akses internet	Ada	√		
7	jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	Ada	√		

2.2.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial di daerah dilakukan untuk mengukur kondisi kesiapan infrastruktur di daerah yang terkait dengan kewargaan. Kebutuhan akan sarana prasarana sosial merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan partisipasi dan keguayuban warga kota disaat smart city akan dan mulai dilaksanakan. Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel II.6 berikut:

Tabel 6 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	Ada	√		

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
2	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	Ada	√		
3	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	Ada	√		
4	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	Ada	√		
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	Ada	√		

2.3. Suprastruktur (Kebijakan & Kelembagaan)

Suprastruktur atau aspek kelembagaan dan kebijakan di daerah merupakan suatu perangkat yang akan menjamin lancar tidak pelaksanaan smart city, khususnya smart city-smart city yang dimulai dan didorong dari inisiatif pemerintah daerah seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi suprastruktur atau kebijakan dan kelembagaan dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu:

2.3.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif smart city yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, analisis terhadap aspek kebijakan di daerah perlu dilakukan. Analisis terhadap kesiapan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 7 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	adanya Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City Daerah	Belum ada			
2	adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim	Ada	√		

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
	Pelaksana Smart City Daerah				
3	adanya masterplan smart city daerah	Tidak Ada (sedang dibikin)			√
4	adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah	Ada	√		
5	adanya visi pembangunan smart city yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Ada	√		
6	adanya kepastian terhadap keberlanjutan program smart city dalam jangka panjang	Ada	√		
7	adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program smart city	Ada	√		

2.3.2 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan smart city di daerah dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah daerah. Di dalam aspek kelembagaan ini, nantinya akan diatur pembagian peran dalam pelaksanaan smart city. Oleh karena itu, aspek kelembagaan menjadi salah satu bagian dari analisis kesiapan smart city di daerah. Analisis terhadap kesiapan kelembagaan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 8 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	adanya Dewan Smart City Daerah	-			
2	adanya Tim Pelaksana Smart City Daerah	Ada (Tangerang Live)		√	
3	adanya SOP smart city daerah	Ada (Tagerang LIVER		√	
4	adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana Smart City di setiap OPD	Ada, Tangerang LIVE		√	

2.3.3 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah.

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan smart city di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan smart city karena di dalam sebuah smart city, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari smart city. Analisis terhadap kesiapan organisasi masyarakat daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel berikut:

Tabel 9 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	Ada	√		
2	adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung smart city	ada	√		

No.	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
3	jumlah forum swadaya masyarakat pendukung smart city	Ada	√		
4	dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung smart city	Ada	√		
5	jumlah forum pendukung smart city yang memiliki sekretariat definitif	Ada	√		
	adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan Smart City Daerah	Belum Ada			

Penjelasan Tambahan

Tingkat kesiapan smart city dalam suatu kota dilakukan dengan mengukur beberapa hal berikut:

1. Struktur

SDM

- Belum optimalnya kesiapan SDM untuk penerapan TIK pada seluruh tatanan instansi pemerintah Kota Tangerang
- Ketidakmerataan jumlah SDM TIK
- Kompetensi berbasis TIK kurang memadai
- Rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Tangerang adalah 10,2
- Jumlah penduduk kota tangerang berdasarkan pendidikan sebanyak 50% berpendidikan minimum SLTA / sederajatnya
- Tingginya animo masyarakat Kota Tangerang dalam menggunakan media informasi dan komunikasi internet dan telepon.
- Masyarakat ikut terlibat dalam pembnagunan, salah satunya pada kegiatan Tangerang Berbenah

Tata Kelola/Pamong

- Sudah terdapat pelayanan berbasis elektronik kota tangerang

- Belum optimalnya aparatur dalam memanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran melalui jaringan *Local Area Network (LAN)* maupun internet;
- Belum optimalnya bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang sudah terbangun atau dikembangkan;

Anggaran

- Adanya alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk kegiatan smart city Kota Tangerang

2. Infrastruktur

Fisik

- Terdapat akses jalan tol yang menghubungkan dengan daerah sekitarnya
- Keberadaan Bandara Internasional Soekarno Hatta di Kota Tangerang
- Telah terpenuhi fasilitas kegiatan keolahragaan
- Pemerintah Kota Tangerang sudah menggunakan fiber optic

Sosial

- Potensi Jumlah UKM sangat banyak yaitu 10.553 unit
- Banyak menawarkan lowongan pekerjaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Kota Tangerang merupakan kota yang berpotensi tinggi dari sektor perdagangan dan jasa
- Potensi masyarakat sebagai masyarakat urban

TIK

- Pemerintah Daerah Kota Tangerang memiliki portal situs web daerah, yang terdiri kurang lebih sebanyak 115 situs.
- Adanya control room smart city (*LIVE Control Room*)
- Wifi sudah terpasang 32 titik ruang publik (taman dan ruang pelayanan publik)
- Pemanfaatan teknologi bagi pemasaran produk melalui media social dan marketplace
- Terdapat *Internet of Thing (IoT)*
- Adanya sistem GPS yang canggih
- Pemanfaatan teknologi untuk menunjang program pengelolaan sampah menjadi energy di TPA Rawa Kucing

3. Suprastruktur

Kebijakan

- Adanya gagasan dan upaya Walikota Tangerang untuk menjadikan Kota Tangerang sebagai kota cerdas atau *smart city* melalui konsep LIVE yang merupakan akronim dari *Liveable* (layak huni), *Investable* (layak investasi), *Visitable* (layak kunjung), dan *E-City* (kota berbasis elektronik).
- Konsep LIVE secara eksplisit tidak terdeskripsikan baik secara umum maupun spesifik dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
- Adanya Kerja sama Universitas Gajah Mada (UGM) dengan Kementrian Dalam Negeri dalam mewujudkan Kota Tangerang menjadi salah satu Pilot Project Pengembangan Smart City di Indonesia
- Pemkot Tangerang telah menandatangani MOU dengan Kementerian Kominfo terkait kota-kota pilot project dan pengembangan smart city di Indonesia
- Adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

Lembaga Pelaksanaan

- Masyarakat
- Organisasi Masyarakat
- Pemerintah Daerah Kota Tangerang
- Pemerintah Pusat

Untuk mengukur kesiapan Smart City Kota Tangerang, pada masing-masing indikator diberi skor 1 – 4. Ketentuan skorsing tersebut di berikan sesuai pencapaian masing-masing indikator, adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1 = Rendah

2 = Sedang

3 = Tinggi

4 = Sangat Tinggi

Apabila total skor adalah sebagai berikut:

8 – 14 = Kesiapan Rendah

15 – 21 = Kesiapan Sedang

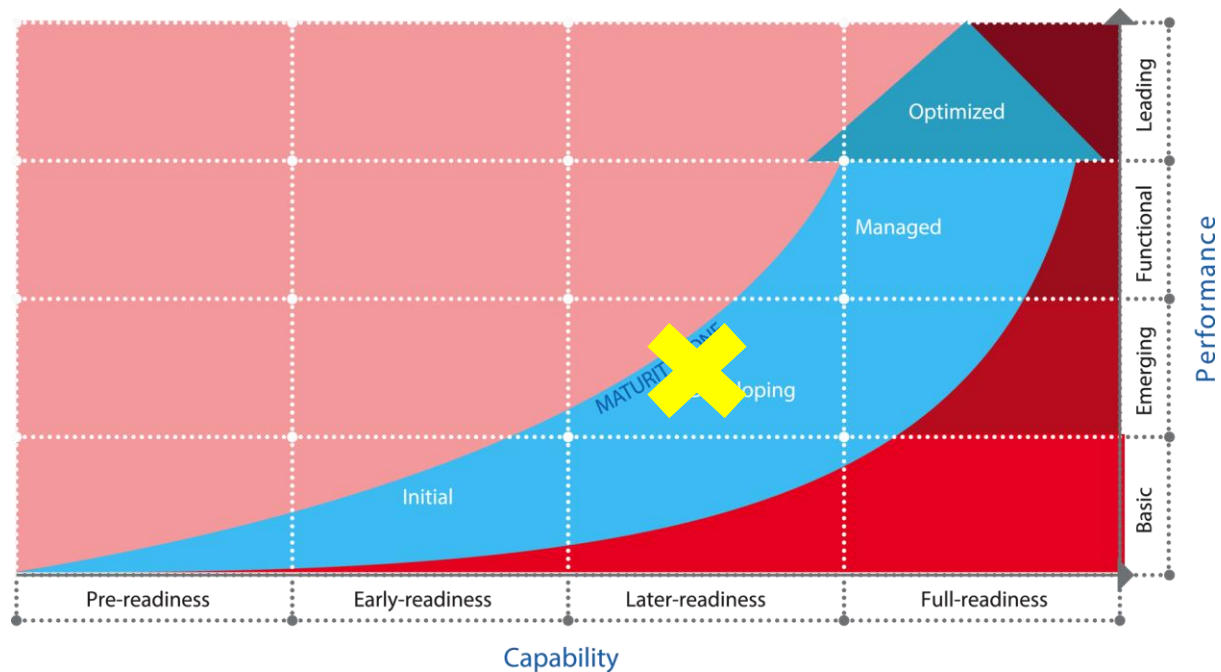
22 – 28 = Kesiapan Tinggi

29 – 32 = Kesiapan Sangat Tinggi

Tabel 10 Penilaian Kesiapan Smart City Kota Tangerang

No	Jenis	Indikator	Skor	Keterangan
1	Struktur	SDM	2	Sedang
		Tata Kelola / Pamong,	3	tinggi
		Anggaran	4	Sangat Tinggi
2	Infrastruktur	Fisik	4	Sangat Tinggi
		Sosial	3	Tinggi
		TIK	4	Sangat Tinggi
3	Suprastruktur	Kebijakan	4	Sangat Tinggi
		Lembaga Pelaksanaan	4	Sangat Tinggi
Jumlah Skor			28	Tinggi

Apabila ditampilkan dalam diagram, posisi kesiapan Smart City Kota Tangerang adalah sebagai berikut.



X = Posisi Kesiapan Smart City Kota Tangerang

III. Analisis Kesenjangan Strategis Daerah

Dikenal juga sebagai “*gap analysis*”. Digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan saat ini (“*as is*”) dan keadaan pada masa akan datang (“*to be*” atau “*future state*”). Selanjutnya kesenjangan digunakan sebagai referensi untuk menetapkan strategi dan langkah langkah yang diperlukan

untuk mengurangi kesenjangan yang ditemukan. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai atau ingin terjadi yang dapat dilihat sebagai hasil dari analisis masa depan, dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan daerah. Kesenjangan inilah yang menjadi mata analisis di dalam bagian ini. Untuk melakukan analisis ini, dapat menggunakan perangkat analisis berupa tabel dibawah ini.

Tabel 11 Analisis Kesenjangan Smart City

No	Kondisi Masa Yang Akan Datang (<i>To be atau future state</i>)	Kondisi Saat Ini (<i>As is</i>)	Program Kerja dan Langkah Aksi (Strategy)
1	<p>Tangerang LIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieveble • Investable • Visitable • E-City 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan sumber daya aparatur belum diberdayakan secara optimal • Sesuai dengan misi 1 pemerintah Kota Tangerang yaitu mewujudkan tata pemerintah yang baik, akuntable, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional • Adanya gagasan dan upaya Walikota Tangerang untuk menjadikan Kota Tangerang sebagai kota cerdas atau <i>smart city</i> melalui konsep LIVE yang merupakan akronim dari <i>Liveable</i> (layak huni), <i>Investable</i> (layak investasi), <i>Visitable</i> (layak kunjung), dan <i>E-City</i> (kota berbasis elektronik). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih; 2. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau; 3. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau; 4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 5. Ketahanan Pangan Daerah; 6. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan

No	Kondisi Masa Yang Akan Datang (To be atau future state)	Kondisi Saat Ini (As is)	Program Kerja dan Langkah Aksi (Strategy)
		<ul style="list-style-type: none"> • Konsep LIVE secara eksplisit tidak terdeskripsikan baik secara umum maupun spesifik dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018. • Adanya Kerja sama Universitas Gajah Mada (UGM) dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan Kota Tangerang menjadi salah satu Pilot Project Pengembangan Smart City di Indonesia • Pemkot Tangerang telah menandatangani MOU dengan Kementerian Kominfo terkait kota-kota pilot project dan pengembangan smart city di Indonesia • Adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang 	<p>Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai;</p> <p>7. Kondisivitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah;</p> <p>8. Pengelolaan Energi;</p> <p>9. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan);</p> <p>10. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;</p> <p>11. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat.</p>

No	Kondisi Masa Yang Akan Datang (To be atau future state)	Kondisi Saat Ini (As is)	Program Kerja dan Langkah Aksi (Strategy)
		<ul style="list-style-type: none"> • Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang berpotensi tinggi dari sektor perdagangan dan jasa, dengan 18 komoditi yang terdiri dari perbengkelan, kendaraan bermotor, furniture, jasa, logam, konveksi, serta makanan dan minuman • Penyerapan tenaga kerja di Kota Tangerang sangat besar, yaitu pada tahun 2016 bursa kerja Kota Tangerang menyediakan 4.036 lowongan • Masih terdapat masyarakat yang membangun permukiman tidak sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang, sehingga menyebabkan kawasan kumuh • Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang sudah hampir 	

No	Kondisi Masa Yang Akan Datang (<i>To be atau future state</i>)	Kondisi Saat Ini (<i>As is</i>)	Program Kerja dan Langkah Aksi (Strategy)
		<p>memenuhi target yang diharapkan pemerintah yaitu sebesar 96,16%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya IPAL dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) • Kota Tangerang memiliki program pengelolaan sampah menjadi energy di TPA Rawa Kucing 	

IV. Analisis Pembangunan Smart City

Dalam perencanaan strategis pengembangan Smart City diperlukan metodologi untuk menentukan langkah langkah strategis apa yang perlu diambil agar tujuan pengembangan Smart City dapat tercapai. Salah satu metodologi yang cukup umum digunakan untuk berbagai jenis perencanaan strategis adalah Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi 4 (empat) aspek yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu program kerja atau proyek. Keempat aspek itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung maupun yang tidak dalam mencapai tujuan program kerja atau proyek dimaksud. Analisis SWOT diterapkan dengan cara menganalisis keempat faktor SWOT. Langkah selanjutnya adalah menetapkan langkah langkah strategis dimana kekuatan (*strengths*) mampu memanfaatkan peluang (*opportunities*) yang ada, di samping itu bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang diidentifikasi. Selanjutnya menetapkan langkah strategis untuk menghadapi atau mengatasi ancaman (*threats*) yang ada, sedapat mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. Untuk menyusun Masterplan Smartcity di Kota Tangerang, perlu terlebih dahulu dilakukan analisis dengan metode SWOT. Menurut Rangkuti F (2010) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan melihat faktor internal (yang muncul dari dalam wilayah pengembangan) dan faktor eksternal (yang ada atau datang dari luar wilayah pengembangan). Faktor internal yang dapat dianalisis adalah kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sedangkan faktor eksternalnya adalah peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Dalam menerapkan konsep Smart City di Kota Tangerang, beberapa indikator yang digunakan adalah Smart Governance, Smart Ekonomi, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Berikut adalah identifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam penyusunan masterplan smartcity Kota Tangerang berdasarkan masing-masing indikator, adalah sebagai berikut :

4.1 Analisis Indikator Smart City

Smart Governance

Smart governance merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam konsep *smart city*, segala kebijakan dan kekuasaan tertinggi dalam

pembangunan di suatu wilayah tergantung kepada pemerintahan setempat. Suatu pemerintahan sudah dapat di katakan *smart* apabila telah memenuhi beberapa kriteria yaitu pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien dan kebijakan public. Berikut adalah penjabaran lebih jelasnya mengenai masing-masing kriteria tersebut:

A. Pelayanan Publik

Maksud dari kriteria pelayanan public ini adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*Rahardjo Adisasmita, 2009*). Kondisi pelayanan publik di Kota Tangerang dalam hal kemudahan, pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan kurang lebih 115 situs web daerah yang dapat diakses masyarakat untuk berbagai macam fungsi, seperti pengaduan, perizinan, arsip, data kepegawaian, dan informasi lainnya yang berguna menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Untuk kondisi ketersediaan sarana, prasarana dan utilitas umum, pemerintah Kota Tangerang terus melakukan pembangunan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta penambahan peralatan dalam menunjang kebutuhan pendidikan terus dilakukan, selain itu juga dilakukan pembangunan fasilitas pada bidang kesehatan yang terdiri dari pembangunan puskesmas dan puskesmas rawat inap.¹

Dari segi Penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat Kota Tangerang, terdapat beberapa permasalahan yang terdiri dari:²

1. Target SPM urusan ketahanan pangan belum tercapai
2. Tingkat koordinasi antar instansi pelaksana urusan ketahanan pangan belum optimal
3. Pemenuhan kebutuhan pangan sebagian besar dipasok dari luar daerah
4. Produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan rendah
5. Diversifikasi hasil pengelolaan pertanian, peternakan, dan perikanan belum optimal
6. Kemampuan sumber daya aparatur belum diberdayakan secara optimal

¹ Antarabanten.com

² Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang 2015 - 2018

Berdasarkan LKIP, besarnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang merupakan parameter yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah selaku penyedia jasa layanan. Berdasarkan pengukuran diketahui bahwa IKM Kota Tangerang berada pada kategori B (Baik) dengan nilai 78,77 hal ini sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah.³

B. Manajemen Birokrasi Yang Efisien

Sesuai dengan misi 1 pemerintah Kota Tangerang yaitu mewujudkan tata pemerintah yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Adapun kondisi pencapaian yang telah dilakukan Kota Tangerang terhadap misi tersebut dapat dilihat dari LKIP yang menjelaskan bahwa pencapaian terhadap misi tersebut adalah sebesar 80.5 %.

C. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan penyusunan masterplan Smart City Kota Tangerang. Diantaranya adalah:

1. Adanya gagasan dan upaya Walikota Tangerang untuk menjadikan Kota Tangerang sebagai kota cerdas atau *smart city* melalui konsep LIVE yang merupakan akronim dari *Liveable* (layak huni), *Investable* (layak investasi), *Visitable* (layak kunjung), dan *E-City* (kota berbasis elektronik).
2. Konsep LIVE secara eksplisit tidak terdeskripsikan baik secara umum maupun spesifik dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
3. Adanya Kerja sama Universitas Gajah Mada (UGM) dengan Kementrian Dalam Negeri dalam mewujudkan Kota Tangerang menjadi salah satu Pilot Project Pengembangan Smart City di Indonesia
4. Pemkot Tangerang telah menandatangani MOU dengan Kementerian Kominfo terkait kota-kota pilot project dan pengembangan smart city di Indonesia
5. Adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

³ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang Tahun 2015

Semua kebijakan tersebut dapat diakses masyarakat dengan mudah melalui situs web yang ada di Kota Tangerang pada masing-masing bidang yang diperlukan, seperti untuk dapat mengetahui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dapat dilihat pada website tangerangkota.go.id. Dari seluruh penjelasan tersebut mengenai indikator *Smart Governance*, berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan.

Tabel 12 SWOT Indikator Smart Governance
Faktor-Faktor Internal

No	KEKUATAN	No	KELEMAHAN
1	Adanya gagasan dan upaya Walikota Tangerang untuk menjadikan Kota Tangerang sebagai kota cerdas atau <i>smart city</i> melalui konsep LIVE yang merupakan akronim dari <i>Liveable</i> (layak huni), <i>Investable</i> (layak investasi), <i>Visitable</i> (layak kunjung), dan <i>E-City</i> (kota berbasis elektronik).	1	Belum optimalnya pengelolaan website Kota Tangerang, e-mail resmi, Call Center melalui akses internet sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha secara elektronik;
2	Konsep LIVE secara eksplisit tidak terdeskripsikan baik secara umum maupun spesifik dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018.	2	Belum optimalnya bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang sudah terbangun atau dikembangkan;
3	Adanya Kerja sama Universitas Gajah Mada (UGM) dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan Kota Tangerang menjadi salah satu Pilot Project Pengembangan Smart City di Indonesia	3	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cepat, tepat dan mudah diakses;
4	Pemkot Tangerang telah menandatangani MOU dengan Kementerian Kominfo terkait kota-kota pilot project dan pengembangan smart city di Indonesia	4	Belum optimalnya integrasi aplikasi/sistem informasi layanan aparatur dan layanan publik berbasis web;

No	KEKUATAN	No	KELEMAHAN
5	Adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.	5	Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
6	Pemerintah Daerah Kota Tangerang memiliki portal situs web daerah, yang terdiri kurang lebih sebanyak 115 situs.	6	Belum optimalnya aparatur dalam memanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran melalui jaringan <i>Local Area Network (LAN)</i> maupun internet;
7	Adanya control room smart city (LIVE <i>Control Room</i>)	7	Belum adanya kesiapan SDM untuk penerapan TIK pada seluruh tatanan instansi pemerintah Kota Tangerang
8	Pemerintah Kota Tangerang sudah menggunakan fiber optic	8	Ketidakmerataan jumlah SDM TIK
9	Wifi sudah terpasang 32 titik ruang publik (taman dan ruang pelayanan publik)	9	Kompetensi berbasis TIK kurang memadai
		10	Prasarana untuk pengembangan TIK masih terbatas di masing-masing SKPD;
		11	Belum adanya peraturan yang mengatur tentang smart city

Faktor-Faktor Eksternal

No	PELUANG	No	ANCAMAN
1	Adanya amanat afirmatif tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya kewajiban bagi seluruh Badan Publik untuk memberikan tata cara pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan.	1	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bergerak sangat pesat yang akan memperbesar tingkat kompleksitas dalam manajemen pengelolaannya.

No	KEKUATAN	No	KELEMAHAN
2	Potensi sumberdaya belum dimanfaatkan secara optimal	2	Meningkatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam menciptakan suatu sistem tata pemerintahan yang tertata baik (<i>good governance</i>) yang transparan dan akuntabel berbasis e-government, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan secara mudah.
3	Adanya kelembagaan pemberdayaan petani (Kelompok, Gabungan Kelompok, KTNA, UPP Perikanan)	3	Masih adanya kawasan rawan bencana (Banjir)

Smart Ekonomi

Ekonomi adalah sebuah kata klasik yang mana dapat dijadikan sebagai tolak ukur berkembang ataupun menurunnya kualitas dan produktivitas suatu wilayah. Ekonomi suatu Kota yang dapat bersaing dengan Kota/wilayah sekitarnya yang berlandaskan indikator-indikator penentu smart economy dapat dikatakan sebagai Kota yang berbasis smart city. Karna salah satu komponen dari smart city itu sendiri ialah smart economy. *Smart economy* memiliki beberapa kriteria yang berguna sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah kegiatan ekonomi pada Kota tersebut sudah berbasis *smart economy*. Adapun indikator *smart economy* sebagai berikut :

A. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*)

Membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang berpotensi tinggi dari sektor perdagangan dan jasa, dengan 18 komoditi yang terdiri dari perbengkelan, kendaraan bermotor, furniture, jasa, logam, konveksi, serta makanan dan minuman. Kualitas produk yang dihasilkan sudah bagus namun belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Tangerang

telah melakukan sosialisasi penerapan SNI guna melindungi produk dalam negeri dalam rangka menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta meningkatkan daya saing dan meningkatkan efisiensi serta kinerja industri Kota Tangerang.⁴

B. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

Penyerapan tenaga kerja di Kota Tangerang sangat besar, yaitu pada tahun 2016 bursa kerja Kota Tangerang menyediakan 4.036 lowongan, selain itu pemerintah Kota Tangerang juga memiliki website lowongan pekerjaan yang memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu untuk jumlah kegiatan UKM di Kota Tangerang pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 10.553 unit, pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan berbagai fasilitas untuk pelaku UKM seperti di bandara soekarno – hatta, pusat belanja hingga taman.⁵

C. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

Produk yang dihasilkan oleh industri Kota Tangerang dipasarkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, pemasaran produk UKM Kota Tangerang tersebut menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran agar lebih mudah, serta menerapkan sistem *marketplace*. Dari seluruh penjelasan tersebut mengenai indikator *Smart Economy*, berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan.

Tabel 13 SWOT Indikator Smart Economy

Faktor-Faktor Internal

No	KEKUATAN	No	KELEMAHAN
1	Kota Tangerang merupakan kota yang berpotensi tinggi dari sektor perdagangan dan jasa	1	Jangkauan pasar hanya mencakup pasar lokal, regional, dan sebagian nasional
2	Banyak menawarkan lowongan pekerjaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	2	Jumlah penduduk pengangguran cukup besar yaitu 79.638 jiwa
3	Jumlah UKM sangat banyak yaitu 10.553 unit	3	Pinjaman modal masih sulit di peroleh masyarakat

⁴ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Tangerang dalam TangerangNews.com

⁵ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Tangerang dalam Neraca.co.id

4	Pemanfaatan teknologi bagi pemasaran produk melalui media social dan markeplace	4	Hanya 0.2 % UKM Kota Tangerang yang siap hadapi MEA ⁶
---	---	---	--

Faktor-Faktor Eksternal

No	PELUANG	No	ANCAMAN
1	Adanya perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	1	Perkembangan pesat konvergensi di bidang TIK yaitu konvergensi dari teknologi telekomunikasi, multimedia dan informatika atau konvergensi 3 “C” (<i>Communications, Computing dan Content</i>) secara signifikan mempengaruhi perkembangan industri terkait dalam memenuhi kebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal, regional dan global.
2	Daya beli masyarakat cukup baik	2	Berlakunya perdagangan bebas antar negara (ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) tahun 2010, ASEAN Economic Community (AEC) 2015, dan Pasar bebas asia Pasifik (APEC) 2020) menyebabkan pengurangan hambatan dalam perdagangan antar negara. Untuk dapat berperan serta dalam kompetisi tersebut, salah satu strategi perlu digunakan adalah melalui peningkatan peran (pengembangan dan pendayagunaan) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

⁶ Bisnis.com

Smart Living

Smart living “*gaya hidup cerdas*” merupakan cara pandang, pola pikir yang berujung pada paradigm kecermatan, praktis, dan kreatifitas. *Smart living* mewakili pandangan orang hidup mengenai semakin perlunya efisiensi, efektifitas, dan kepraktisan dalam gaya hidup. Solusi ini yang tepat untuk gaya hidup modern saat ini dan akan menjadi hal yang praktis dan efisien bagi kehidupan seterusnya. Terdapat 3 kriteria dalam menentukan kondisi smart living di suatu wilayah yaitu terdiri dari Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*), Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*), dan Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*). Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

A. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

Untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis (lingkungan pemukiman, pusat kegiatan bisnis dan fasilitas rekreasi) penggunaan lahan di Kota Tangerang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang membangun permukiman tidak sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang, sehingga menyebabkan kawasan kumuh. Hal tersebut terjadi dikarenakan tingginya angka urbanisasi di Kota Tangerang.

B. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)

Angka harapan hidup masyarakat Kota Tangerang cukup tinggi, yaitu sebesar 71,29 %, hal tersebut dikarenakan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat baik. Berdasarkan LKIP⁷ cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang sudah hampir memenuhi target yang diharapkan pemerintah yaitu sebesar 96,16%, sedangkan mengenai ketersediaan obat, sarana kesehatan dan rasio dokter per 1000 penduduk telah melebihi dari target yang diharapkan. Sedangkan untuk sarana keolahragaan, Kota Tangerang telah memenuhi kebutuhan ketersediaan sarana olahraga daerah.

C. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

Ketersediaan transportasi di Kota Tangerang sangat beragam, mulai dari angkutan kota (angkot), bis umum, kereta api, hingga transportasi udara (pesawat terbang). Kota Tangerang memiliki bandara internasional Soekarno

⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang Tahun 2015

Hatta, dimana letak bandara tersebut berada pada sebagian besar Kecamatan Benda. Namun transportasi yang ada di Kota Tangerang belum terintegrasi.

Selain beberapa keunggulan tersebut, nyatanya Kota Tangerang masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya belum tersedianya sarana dan prasarana difabel di ruang public, Jalur jalan tidak bertambah (kurang jalan layang), Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan serta Kurangnya kenyamanan transportasi publik. Untuk kondisi jaringan jalan kota, berdasarkan BPS Kota Tangerang 2016 mencatat terdapat sepanjang 2,89 km jalan yang mengalami kondisi rusak.⁸

Dari seluruh penjelasan tersebut mengenai indikator *Smart Living*, berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan.

Tabel 14 SWOT Indikator Smart Living

Faktor-Faktor Internal

No	KEKUATAN	No	KELEMAHAN
1	Adanya RTRW Kota Tangerang sebagai upaya perwujudan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis	1	Banyaknya timbul permukiman baru yang tidak sesuai tata ruang
2	Angka harapan hidup masyarakat Kota Tangerang cukup tinggi, yaitu sebesar 71,29 %,	2	Belum tersedianya sarana dan prasarana difabel di ruang public
3	Telah terpenuhi fasilitas kegiatan keolahragaan	3	Jalur jalan tidak bertambah (kurang jalan layang)
4	Keberadaan Bandara Internasional Soekarno Hatta di Kota Tangerang	4	Jalan kota rusak sepanjang 2,89 km
5	Terdapat akses jalan tol yang menghubungkan dengan daerah sekitarnya	5	Kurangnya kenyamanan transportasi public.

Faktor-Faktor Eksternal

No	PELUANG	No	ANCAMAN
1	Tingginya urbanisasi masyarakat ke Kota Tangerang	1	Kota Tangerang sering mengalami bencana banjir
		2	Wabah penyakit saat banjir

⁸ Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Tangerang Tahun 2016

		3	Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan
		4	Maraknya permukiman kumuh di pinggiran kota

Smart Society

Smart Society ini merupakan indikator yang memiliki sasaran yaitu mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Terdapat beberapa kriteria untuk mewujudkan *Smart Society* ini, diantaranya Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*), Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*) dan Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*). Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

A. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)

Perkembangan jumlah penduduk sangat pesat di Kota Tangerang yaitu pada tahun 2010 – 2015 dimana laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.62. Tingginya animo masyarakat Kota Tangerang dalam menggunakan media informasi dan komunikasi internet dan telepon merupakan suatu modal yang baik dalam menerapkan konsep Smart City di kota ini. Jumlah penduduk kota tangerang berdasarkan pendidikan sebanyak 50% berpendidikan minimum SLTA / sederajatnya yang artinya bahwa diasumsikan sebagian besar masyarakat Kota Tangerang melek teknologi. Selain itu guna mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, jumlah UKM di Kota Tangerang pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu menjadi berjumlah 10.553 unit, dan organisasi pemuda di Kota Tangerang sangat banyak.⁹ Dalam upaya mengatasi permukiman kumuh, pemerintah Kota Tangerang bekerjasama dengan masyarakat mengadakan program Tangerang Berbenah yaitu program untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh.

B. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)

Berdasarkan BPS Korta Tangerang 2017, rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Tangerang adalah 10,2, sedangkan untuk indeks pengetahuan Kota Tangerang pada tahun 2016 adalah sebesar 10.78. Guna membangun platform

⁹ Pidato walikota pada festival kampung pemuda

edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan lain-lain, Kota Tangerang sering mengadakan seminar atau penyuluhan seperti penyuluhan siaga bencana, serta seminar mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam produk industri yang dihasilkan.

C. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

Semakin meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi berbasis informasi yang menuntut pemerintah termasuk Kota Tangerang untuk dapat melakukan control melalui sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (IT) untuk mengatasi perkembangan masalah *cyber crime* di Kota Tangerang. Adanya kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan memberikan free trial layanan M2M (*Machine to Machine*) seperti T-Bike dan T-Drive, hal ini merupakan teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)* yang diberikan Telkomsel. Fungsinya mendorong dan mempercepat penguatan sistem smart city Kota Tangerang, fitur ini dapat memonitor dan memandu lokasi, kecepatan dan area berkendara sepeda motor, serta mengendalikan akses mesin kendaraan bermotor dari aplikasi di ponsel pintar Android dan iOS. Dengan didukung dengan sistem GPS yang canggih, kedua layanan tersebut juga mampu mendukung operasional dan pembatasan kecepatan. Dari seluruh penjelasan tersebut mengenai indikator *Smart Society*, berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan.

Tabel 15 SWOT Indikator Smart Society

Faktor-Faktor Internal

No	KEKUATAN	No	KELEMAHAN
1	Perkembangan jumlah penduduk sangat pesat di Kota Tangerang yaitu pada tahun 2010 - 2015 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.62.	1	Masih terdapat masyarakat yang di belum melek teknologi
2	Tingginya animo masyarakat Kota Tangerang dalam menggunakan media informasi dan komunikasi internet dan telepon.	2	Sebesar 50 % penduduk Kota Tangerang memiliki pendidikan dibawah standar ideal pendidikan Indonesia (SLTA/ sederajat)
3	Jumlah penduduk kota tangerang berdasarkan pendidikan sebanyak	3	

	50% berpendidikan minimum SLTA / sederajatnya	Pemanfaatan <i>Internet of Thing (IoT)</i> Kota Tangerang belum digunakan pada seluruh kegiatan
4	Rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Tangerang adalah 10,2	
5	Jumlah UKM di Kota Tangerang pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu menjadi berjumlah 10.553 unit	
6	Indeks pengetahuan Kota Tangerang pada tahun 2016 adalah sebesar 10.78	
7	Terdapat banyak organisasi pemuda di Kota Tangerang sangat	
8	Terdapat <i>Internet of Thing (IoT)</i>	
9	Adanya sistem GPS yang canggih	
10	Adanya program Tangerang Berbenah	

Faktor-Faktor Eksternal

No	PELUANG	No	ANCAMAN
1	Perkembangan <i>Internet of Thing (IoT)</i> dalam penerapan smart city sangat berkembang pesat	1	Semakin meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi berbasis informasi yang menuntut pemerintah termasuk Kota Tangerang untuk dapat melakukan control melalui sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (IT) untuk mengatasi perkembangan masalah <i>cyber crime</i> di Kota Tangerang;
2	Banyaknya kontribusi perusahaan di Kota Tangerang dalam mewujudkan Smart City Kota Tangerang	2	Tingginya urbanisasi masyarakat ke Kota Tangerang

Smart Environment

Smart Environment merupakan suatu lingkungan yang di tunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat yang bertujuan untuk manajemen lingkungan, mencegah polusi, melindungi lingkungan secara berkelanjutan.

Cook and Das [2] mendefinisikan lingkungan pintar sebagai "dunia kecil di mana berbagai jenis perangkat pintar terus bekerja untuk membuat hidup penduduk lebih nyaman". Adapun tujuan dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Kriteria dari *Smart Environment* terdiri dari Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*), Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*), dan Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*).

A. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)

Kota Tangerang telah memanfaatkan teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)* namun belum dipergunakan secara maksimal seperti pada pengembangan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara. Pembangunan RTH di Kota Tangerang belum memenuhi target yang di harapkan pemerintah daerah, dari target 28,24% pada tahun 2015 baru tercapai sebesar 8,85%¹⁰. Dalam hal persampahan, Kota Tangerang memiliki TPA Rawa Kucing yang memiliki luas sebesar 35 hektar. Kondisi pencemaran sungai di Kota Tangerang tinggi, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang terdapat 1.113 pabrik yang berpotensi mencemari sungai di Kota Tangerang, baik itu limbah cair maupun limbah padat berbahaya (B3). Sebanyak 634 industri penghasil limbah cair belum optimal dalam mengelola Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga limbah cair yang dihasilkan dan rata-rata mengandung logam berat dibuang secara sembarangan ke sungai. Menurut Wahana Hijau Fortuna (WHF) Kota Tangerang¹¹, bahwa terdapat 3 sungai yaitu sungai Cisadane, sungai Cirarab, dan sungai Cimanceuri yang saat ini mengalami pencemaran, sedangkan untuk kondisi terparah adalah sungai Cirarab. Kondisi tersebut juga sangat mengkhawatirkan, dikarenakan sungai Cisadane merupakan sumber bahan baku andalan PDAM untuk di konsumsi masyarakat Kota Tangerang. Berbeda dengan kondisi sungai, kualitas udara di Kota Tangerang masih berada di ambang batas normal. Kota Tangerang pun merupakan salah satu daerah percontohan dalam rangka mewujudkan lingkungan udara yang bersih melalui intervensi emisi¹². Upaya yang terus

¹⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang Tahun 2015

¹¹ Okezone.com

¹² Wawancara antarabarter.com dengan Walikota Tangerang 2016

dilakukan pemerintah Kota Tangerang terdiri dari kegiatan car free day, gerakan penanaman pohon, uji emisis hingga kampung bersih.

B. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)

Dalam pengelolaan limbah rumah tangga di Kota Tangerang dilakukan dengan adanya IPAL dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), begitu pun bagi pengelolaan sampah publik.

C. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)

Kota Tangerang memiliki program pengelolaan sampah menjadi energy di TPA Rawa Kucing dengan mendapat bantuan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini dapat mengelola sampah sampai 6 ton sampah plastic per hari atau bias menghasilkan sekitar 3000 liter solar per hari. Sedangkan TPA Rawa Kucing menampung 1000 ton sampah per hari dan 30% sampah plastic maka dapat menghasilkan 150 ribu liter solar. Dari seluruh penjelasan tersebut mengenai indikator *Smart Environment*, berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan.

Tabel 16 SWOT Indikator Smart Society

Faktor-Faktor Internal

No	KEKUATAN	No	KELEMAHAN
1	Kota Tangerang telah memanfaatkan teknologi sensor digital atau <i>Internet of Thing (IoT)</i>	1	Pembangunan RTH di Kota Tangerang belum memenuhi target yang di harapkan pemerintah daerah, dari target 28,24% pada tahun 2015 baru tercapai sebesar 8,85%
2	Kota Tangerang memiliki TPA Rawa Kucing yang memiliki luas sebesar 35 hektar	2	Terdapat 3 sungai Kota Tangerang yang mengalami pencemaran yaitu sungai Cisadane, sungai Cirarab, dan sungai Cimanceuri
3	Adanya IPAL dan TPST	3	Sebanyak 634 industri penghasil limbah cair belum optimal dalam mengelola Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

No	KEKUATAN	No	KELEMAHAN
4	Kota Tangerang memiliki program pengelolaan sampah menjadi energy di TPA Rawa Kucing	4	Terdapat 1.113 pabrik yang berpotensi mencemari sungai di Kota Tangerang
5	Kualitas udara di Kota Tangerang masih berada di ambang batas normal.	5	Sungai Cisadane merupakan sumber bahan baku andalan PDAM untuk di konsumsi masyarakat Kota Tangerang merupakan salah satu sungai yang tercemar

Faktor-Faktor Eksternal

No	PELUANG	No	ANCAMAN
1	Adanya bantuan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik dalam mewujudkan program pengelolaan sampah menjadi energy di TPA Rawa Kucing	1	Banyaknya industri yang ada di Kabupaten Tangerang
2	Kota Tangerang menjadi daerah percontohan bagi pengelolaan sampah dan udara	2	Pencemaran sungai tidak hanya dari Kota Tangerang

4.2 Strategi Pembangunan Smart City

Berdasarkan hasil analisa diatas maka dirumuskan strategi pembangunan smart city kota tangerang. strategi pembangunan smart city kota tangerang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Master Plan Smart City Kota Tangerang secara partisipatif dan terbuka, serta mengintegrasikan ke dalam RPJP dan RPJM
2. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap penataan dan pengelolaan pemerintahan dan keadministrasian yang baik (bersih-amanah), akuntabel, dan transparan, yang mampu menjalin koordinasi, kemitraan, dan kerjasama dengan berbagai stakeholder pembangunan (masyarakat umum, dunia usaha, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) lainnya, dan dengan lembaga legislatif daerah (DPRD), serta juga didukung oleh struktur dan unsur birokrasi yang berintegritas, berkompetensi, responsif, adaptif, empatik, dan profesional

3. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Sistem data/informasi pembangunan daerah yang meliputi ketersediaan, kelengkapan, kevalidan, dan akuntabilitasnya, serta pengembangan dan berbagai kajian/penelitian sebagai unsur pendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Sosialisasi internet sehat, cerdas, kreatif, dan produktif Strategi Kelemahan dan Peluang
5. Penyusunan peraturan/kebijakan tentang Smart City
6. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial-budaya-kemasyarakatan yang berkeagamaan, berkemanusiaan, berkeadilan, dan berkebudayaan, dengan sumberdaya aparatur yang kompeten dan kapabel, serta penggunaan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir
7. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap penataan dan pengelolaan pemerintahan dan keadministrasian yang baik (bersih-amanah), akuntabel, dan transparan, yang mampu menjalin koordinasi, kemitraan, dan kerjasama dengan berbagai stakeholder pembangunan (masyarakat umum, dunia usaha, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) lainnya, dan dengan lembaga legislatif daerah (DPRD), serta juga didukung oleh struktur dan unsur birokrasi yang berintegritas, berkompetensi, responsif, adaptif, empatik, dan professional
8. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan keterpaduan perekonomian lokal dengan perekonomian global (nasional dan regional), yang berbasis pada perekonomian kerakyatan serta Strategi Kelemahan dan Ancaman
9. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap perluasan cakupan dan peningkatan pemanfaatan hasil (outcome) pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pemantapan dan peningkatan sistem daya dukung dan keberlanjutan ekologis dalam pembangunan daerah.
10. Memperkuat inovasi taman tematik bersama asosiasi forum dan komunitas
11. Penguatan kerja sama antar Pemerintah Kota Tangerang dengan Kampus untuk memajukan Kota Tangerang

12. Sosialisasi aplikasi-aplikasi publik Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat
13. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelayanan publik/masyarakat serta pelayanan aparatur pemerintahan daerah
14. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan banjir, misal tanggul
15. Strategi Ancaman dan Kekuatan
16. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta ketersediaan sarana-prasarana pendukung seperti: perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), dan kompetensi operator (brainware), serta didukung juga oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai (berkemampuan/berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman)
17. Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dasar perkotaan dan penguatan sistem daya dukung lingkungan, serta pengintegrasian sistem/jaringan transportasi dan kelalulintasan perkotaan
18. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang baru dan baik
19. Kampanye kepada warga untuk mau menggunakan kendaraan umum

V. Visi Pembangunan Smart City

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi smart city daerah

sebagai landasan perumusan rumusan sasaran target capaian pembangunan smart city di daerah. Bahan pertimbangan dalam merumuskan visi dan misi smart city daerah adalah visi pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan dan rencana tata ruang daerah. Berikut ini penjabaran mengenai kebijakan tersebut

5.1. Visi, Misi Rencana Pembangunan Kota Tangerang

Visi Merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan misi yang diemban. Terkait dengan hal ini, maka pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode 2014-2018 yang ditetapkan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota merupakan hasil proses politik terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat, maka visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH”

Penjelasan terhadap penjelasan visi tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17 Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah	Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju	Terwujudnya Kota Tangerang yang maju dalam berbagai hal, melalui pemberian pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan tata kelola perkotaan yang berorientasi lingkungan.
	Terwujudnya Kota Tangerang yang Mandiri	Terwujudnya Kota Tangerang yang mandiri, melalui pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggung jawab dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah.
	Terwujudnya Kota Tangerang yang Dinamis	Terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis yaitu kehidupan yang berkesinambungan dengan mengikuti era perkembangan zaman dengan tetap menjaga mencerminkan kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang meskipun berbeda latar belakang etnis dan budaya, namun memiliki semangat kebersamaan dan nasionalisme berbasis kedaerahan, tenggang rasa dan tanggung jawab, sikap toleransi yang universal, dalam membangun Kota Tangerang.
	Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera	Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, melalui perwujudan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera yaitu memiliki tatanan kehidupan yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan daerah.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Terwujudnya Masyarakat Akhlakul Karimah	Terwujudnya masyarakat Kota Tangerang yang memiliki akhlakul karimah, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madani <i>madaniyyah</i> dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (<i>baldatun toyibatun warabun ghafur</i>).

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi

penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi;
3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi;
4. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.

Adapun penjelasan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

Tabel 18 Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Visi	Misi	Penjelasan Misi
Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional	Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi aparatur yang mengedepankan profesionalisme, kompetensi, kualitas, transparansi, objektivitas, dan bebas dari intervensi politik dan korupsi,

Visi	Misi	Penjelasan Misi
		kolusi, dan nepotisme (KKN) berintegritas, kompeten, dan profesional.
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat kemajuan Kota Tangerang, yang dilakukan dengan memajukan kegiatan ekonomi yang menjadi sektor unggulan, seperti perdagangan dan jasa, industri, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) sehingga mampu bersaing, serta memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.
	Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi	Pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang berdaya saing, kualitas kehidupan masyarakat Kota Tangerang, yang ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan sumberdaya manusia, kualitas dan kuantitas sarana dan

Visi	Misi	Penjelasan Misi
		prasarana pelayanan, serta faktor pendukung lainnya.
	Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas	Penyediaan dan peningkatan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas. mutlak diperlukan sekaligus dapat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif. Sarana perkotaan merupakan faktor penunjang bagi kegiatan ekonomi Kota Tangerang.
	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman	Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung dalam rangka melaksanakan merupakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, serta seimbang antara dapat menciptakan kondisi kemajuan yang seimbang antara peningkatan aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup.

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki critical point dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka program Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19 Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Misi		Tujuan	
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung	1.1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance)

Misi		Tujuan	
	dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional	1.2	Mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi sebagai pendukung pelaksanaan sistem penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian
3	Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi	3.1	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas
4	Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas	4.1	Meningkatkan sistem pengendalian banjir yang memadai
		4.2	Mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang modern dan terpadu
5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman	5.1	Meningkatkan kualitas penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Analisis Tahun 2016

5.2 Tujuan Penataan Ruang Kota Tangerang

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Tangerang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

1) Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Tangerang ke depan adalah :

- Banjir di Kota Tangerang yang disebabkan oleh sumber-sumber banjir seperti Sungai Cisadane, Cirarab, Sabi dan Angke, serta beberapa situ, yakni Situ Cipondoh, Situ Bulakan dan Situ Cangkring.
- Gangguan lalu lintas yang ditimbulkan akibat tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa yang tidak terkendali, dan hal ini juga menyebabkan penurunan fungsi jalan.
- Tidak tersedianya lahan bagi ruang terbuka hijau.
- Kawasan industri yang terus mengalami penurunan kualitas terutama di Kecamatan Jatiuwung.
- Banyaknya lahan kosong yang sudah dikuasi oleh pengembang.
- Kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta yang belum tertata

2) Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Tangerang 20 tahun mendatang adalah :

- Pengembangan wilayah pusat yang baru.
- Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016
- Investasi bagi pemilik modal untuk pengembangan perumahan sehat sederhana.
- Penyediaan bagi ruang terbuka hijau, bukan saja sebagai areal resapan air, tapi juga merupakan paru-paru kota bagi Kota Tangerang.

3) Tujuan atau Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Tangerang adalah : *“Kota Industri, Perdagangan dan Jasa Yang Maju dan Lestari Berlandaskan Akhlakul Karimah”*. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Tangerang diharapkan menjadi kota yang tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sumberdaya manusia berpendidikan yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, struktur ekonomi berbasis industri dan jasa yang tangguh, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya peran serta

rakyat secara nyata dan aktif dalam segala aspek kehidupan, terwujudnya supremasi hukum dan terpeliharanya budaya demokrasi yang berlandaskan Akhlakul Karimah.

4) Misi atau sasaran Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Tangerang yang ingin dicapai terkait adalah :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing;
- b. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing;
- c. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.
- d. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing
- e. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pokok di atas, dirumuskan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Tangerang sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Tangerang sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan berskala regional berwawasan lingkungan dan budaya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur)”

A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Tangerang

Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Tangerang berdasarkan pada kedudukan, peran dan fungsi Kota Tangerang terhadap DKI Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya, maka perlu diterapkan konsep pengembangan megapolitan – *network city*. Kota Tangerang tidak selalu hanya berfungsi sebagai pendukung kota inti (Jakarta) saja, tapi harus mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, seperti mengambil *added value* dari keberadaan Bandara Internasional Soekarno - Hatta:

1. MICE (*meeting incentive convention exhibition*)

Dengan posisi Kota Tangerang yang berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Kota Tangerang diharapkan sebagai pintu gerbang kedua, setelah DKI Jakarta, sebagai *meeting point* bagi pendatang dari luar negeri maupun penduduk dalam negeri yang dari/ke Bandara Internasional Soekarno – Hatta.

2. International Logistic Area

3. Home Equipment Center

4. Fasilitas Berstandar Internasional

Pelayanan fasilitas dengan standar internasional seperti rumah sakit, sarana pendidikan, sarana hiburan dan rekreasi yang dilengkapi dengan teknologi yang maju.

5. Gerbang pariwisata Provinsi Banten (budaya, kuliner, religius, alam, belanja) Dengan karakteristik Kota Tangerang yang unik, diharapkan Kota Tangerang dapat menjadi gerbang pariwisata di Provinsi Banten.
6. Industri: dari *manufacture* ke *creative industry* (animasi, film, musik, fashion, dll)
7. *Network development Competition – Cooperation*
8. Kawasan Aerotropolis

Pertama, membangun wilayah sekitar bandara dengan hotel, perkantoran, ritel, factory outlet dan pusat bisnis lainnya. Hal ini akan membuat wisatawan atau pengunjung yang singgah di bandara tidak kesulitan untuk mengakses fasilitas-fasilitas perekonomian.

Kedua, menyediakan transportasi yang beragam dan saling terhubung dengan bandara. Transportasi kereta api, bus pengumpan, jalan tol, dan transportasi publik lainnya mutlak terhubung dengan bandara.

Ketiga, menyediakan dan membangun fasilitas pengangkutan logistik di sekitar bandara

Disusun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Tangerang yang mencakup kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan pola ruang kota dibagi menjadi kebijakan pengembangan kawasan lindung, kebijakan pengembangan kawasan budidaya dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. Masing-masing kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam langkah-langkah operasional atau strategi untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kota Tangerang

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Tangerang sampai tahun 2030 meliputi:

- 1) Mengembangkan pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dengan mengembangkan fungsinya secara berhierarki dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjangnya.

Strategi:

- a. mengembangkan kota di wilayah Tengah dan Timur sebagai pusat komersial dengan skala layanan regional dan/atau internasional berwawasan lingkungan;

- b. membatasi perkembangan kota di wilayah utara dengan mengutamakan keselamatan operasi penerbangan dan mengembangkan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;
- c. mengembangkan industri ramah lingkungan di wilayah barat; dan
- d. mengembangkan permukiman dan perumahan berwawasan lingkungan di wilayah timur dan wilayah selatan.

2) Peningkatan akses ke pusat-pusat pelayanan kota dan ke luar wilayah kota secara merata dan berhirarki.

Strategi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan (*environmentally sustainable transportation*);
- b. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
- c. mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*);
- d. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
- e. mengembangkan sistem transportasi massal; dan
- f. mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam kota.

3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.

Strategi:

- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi jalan dan kereta api dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
- b. mengembangkan jaringan prasarana telekomunikasi yang diutamakan pada kawasan komersial, industri, fasilitas umum, dan permukiman;
- c. meningkatkan pelayanan jaringan prasarana energi secara optimal dan efisien;
- d. mengembangkan pengelolaan jaringan prasarana sumberdaya air sebagai upaya penyediaan sumber air baku dan pengendalian banjir;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem pengelolaan air minum;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik;
- g. meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sistem persampahan;
- h. mengembangkan sistem drainase;

- i. mengembangkan jalur pedestrian sepanjang jalur utama kota, kawasan komersial, dan fasilitas umum; dan
- j. menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota Tangerang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Tangerang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sampai tahun 2030 meliputi:

A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

- 1) Pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya.

Strategi:

- a. menetapkan kawasan lindung di wilayah kota untuk mendukung ruang terbuka hijau kota;
 - b. meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem;
 - c. mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dalam mengarahkan kegiatan pembangunan fisik; dan
 - d. meningkatkan jumlah RTH hingga mencapai 30% pada akhir tahun perencanaan
 - e. mengoptimalkan penggunaan mekanisme insentif-disinsentif untuk penyediaan RTH
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Strategi:

- a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- b. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; dan
- c. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

- 1) Pengembangan kawasan budidaya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi:

- a. mempertahankan kawasan pertanian yang didukung oleh jaringan irigasi teknis sebagai komponen pendukung konservasi kawasan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian;
 - c. mengurangi dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - d. mengembangkan fungsi-fungsi perkotaan dengan tetap memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau melalui pengaturan intensitas ruang; dan
 - e. mengembangkan kawasan permukiman berdasarkan tingkat hunian padat dan sedang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan dan didukung dengan akses yang baik.
- 2) Pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota.

Strategi:

- a. menetapkan dan mengintensifkan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan regional pada kawasan pusat-pusat pelayanan kota;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota dengan memperhatikan karakteristik kawasan;
 - c. mengatur kawasan perdagangan dan jasa yang berkembang secara linier pada jalan-jalan utama kota sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - d. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa seperti pendekatan super blok atau mix-used pada kawasan pelayanan kota; dan
 - e. menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan dan kondisi sosial lingkungan.
- 3) Pengendalian dan intensifikasi kawasan peruntukan industri serta mengembangkan industri kreatif.

Strategi:

- a. melakukan penataan kegiatan industri dengan mengarahkan kepada industri yang ramah lingkungan;
 - b. menumbuhkembangkan sektor industri kreatif sebagai salah satu penggerak perekonomian kota;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan industri agar tidak merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
 - d. mewajibkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengelola limbah cair, padat maupun gas hingga mencapai kualitas baku mutu lingkungan yang disyaratkan, dan melakukan pengelolaan bahan B3 dan limbah B3; dan
 - e. mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri.
- 4) Pengembangan fasilitas pendidikan regional.
- a. merencanakan persebaran sarana pendidikan berdasarkan skala pelayanannya;
 - b. mendukung pengembangan sarana pendidikan dan kawasan Perguruan Tinggi; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung fasilitas pendidikan regional.
- 5) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI.

D. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota Tangerang
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Tangerang sampai tahun 2030 meliputi:

- 1) Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Strategi:

- a. menetapkan daerah perairan dan sempadan Sungai Cisadane serta situ yang ada di dalam wilayah Kota Tangerang sebagai kawasan strategis kota berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu dan mengurangi fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dan situ; dan
 - c. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar sempadan sungai dan situ.
- 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota.

Strategi:

- a. mengembangkan kawasan pusat kota baru sebagai salah satu pusat pelayanan kota dengan fungsi pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa skala regional dan nasional yang berwawasan lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan di sepanjang sisi Jalan Tol Jakarta - Tangerang sebagai kawasan ekonomi prospektif;
 - c. mengembangkan kawasan di sepanjang sisi jalan Tol Prof. Sedyatmo, Jalan Tol JORR II, Jalan Tol Serang Panimbang, Jalan Tol Kunciran Serpong, Jalan Tol Serpong Cinere, Tol Serpong Balaraja, dan Jalan Tol dalam Kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. menata kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jatiuwung dengan mengembangkan industri yang ramah lingkungan; dan
 - e. meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pada kawasan strategis ekonomi
- 3) Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya lokal.

Strategi:

- a. merehabilitasi dan menata kawasan wisata kota lama;
- b. mempertahankan dan melestarikan bangunan cagar budaya; dan
- c. mengembangkan atraksi dan sarana serta prasarana pariwisata.

4) Pengembangan kawasan aerotropolis di sekitar bandara

Strategi:

- a. merehabilitasi dan menata kawasan sekitar Bandara Soekarno – Hatta di Kecamatan Benda dan Neglasari
- b. mengarahkan pembangunan di kawasan sekitar Bandara Soekarno – Hatta di Kecamatan Benda dan Neglasari sebagai kawasan komersial
- c. mengarahkan pembangunan di kawasan sekitar Bandara Soekarno – Hatta di Kecamatan Benda dan Neglasari sebagai pusat pertumbuhan yang mandiri

dengan membangun kawasan bisnis, menyediakan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dengan kawasan sekitarnya

- d. mengarahkan pembangunan di kawasan sekitar Bandara Soekarno – Hatta di Kecamatan Benda dan Neglasari untuk fungsi pendukung lainnya seperti permukiman
- e. meningkatkan promosi kepada investor untuk mengembangkan kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta
- f. mengendalikan intensitas pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Bandara Soekarno – Hatta sesuai kaidah KKOP

5) Pengembangan kawasan pengembangan Transit Oriented Development (TOD)
Strategi:

- a. merehabilitasi dan menata kawasan TOD di Kecamatan Batuceper
- b. mengarahkan penggunaan ruang di kawasan TOD di Kecamatan Batuceper sebagai zona campuran yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, serta fasilitas pendukung;
- c. mengarahkan pembangunan perumahan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, misalnya berupa apartemen ataupun condominium;
- d. menyediakan fasilitas perbelanjaan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, fasilitas olahraga, fasilitas perbankan.
- e. mengoptimalkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi di kawasan TOD di Kecamatan Batuceper

5.2 Visi Pembangunan Smart City Kota Tangerang

visi dan misi smart city daerah sebagai landasan perumusan rumusan sasaran target capaian pembangunan smart city di daerah. Visi dan misi smart city kota tangerang memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- b. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
- c. Harapan warga masyarakat;
- d. Analisis Faktor eksternal di masa depan;

Visi smart city Kota Tangerang suatu rumusan visi smart city, yaitu sebagai berikut:

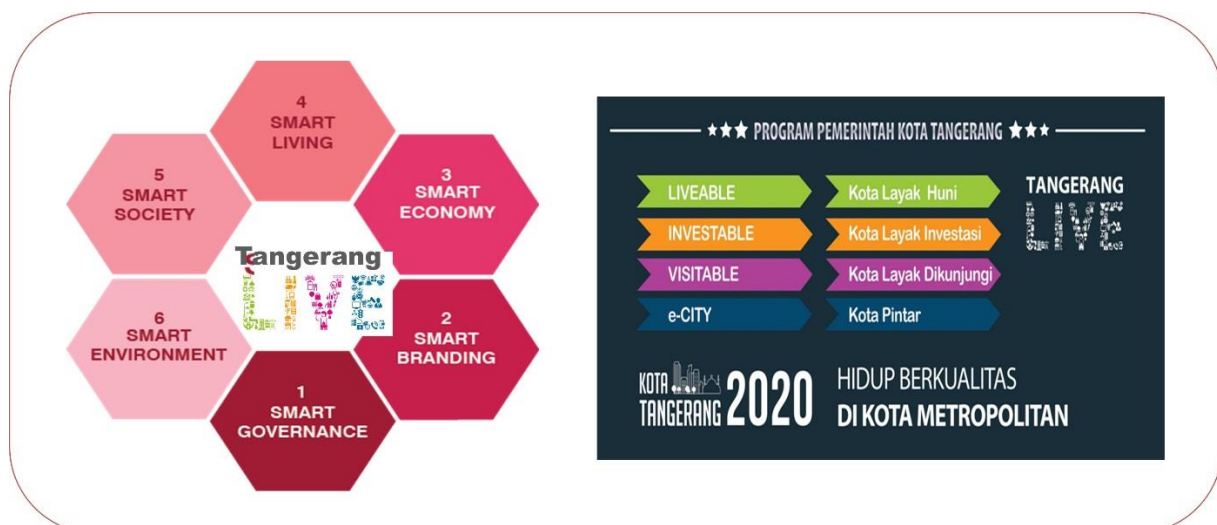
- a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun mendatang (clarity of direction);

- b. Menjawab permasalahan pembangunan smart city daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (articulative);
- d. Disertai penjelasan mengapa visi smart city tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
- e. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah dan nasional.

VISI

Berdasarkan pertimbangan sebelumnya maka rumusan visi smart city kota Tangerang adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan TANGERANG LIVE (Liveable, Investable, Visitable & E City) Melalui 6 Elemen Pembangunan Smart City”



Gambar 1 Visi Smart City Kota Tangerang

Sasaran

Sasaran Smart City Kota Tangerang adalah sebagai berikut

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional melalui Smart Government
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan layak investasi melalui Smart Economy

- c. Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, nyaman, efisien serta tersedianya pelayanan sarana perkotaan melalui Smart Living
- d. mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi melalui smart Society
- e. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman melalui Smart Environment
- f. Meningkatkan pemasaran potensi dan daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional sehingga layak dikunjungi melalui smart Branding

Smart Governance

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional melalui Smart Government

a. Pelayanan Publik (Public Service)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (Bureaucracy)

- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency).
- Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & interoperability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut

dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “City Operation Center (COC)”.

c. Efisiensi Kebijakan Publik (Public Policy)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Smart Branding

Sasaran : peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (destination).
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (amenities) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/bedding & breakfast (B&B), restoran, dan lain-lain.
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (hospitality) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.

b. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)

- Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah.
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah.
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain

c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

- Membangun batas wilayah (edge), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (landmark), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (signage), struktur jalan yang teratur (path), dan titik simpul kota (node) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

Smart Economy

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan layak investasi melalui Smart Economy

- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (industry)
 - Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Welfare)
 - Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (income)
 - Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (employment)
 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (empowerment).
- c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)
 - Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash
 - Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan
 - Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri e-commerce dan market place.

Smart Living

Mewujudkan pembangunan kota dengan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien.

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (residential), lingkungan pusat kegiatan bisnis (commercial) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (recreational).

b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (Health)

Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (food), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (healthcare), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (sport).

c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (Mobility)

Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (mobility) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

Smart Society

mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang market place dan lain-lain.

b. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (Learning)

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang disable.
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya smart school, smart campus, smart pesantren, smart training program dan lain-lain.

c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)

- Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi

masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT).

Smart Environment

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman melalui Smart Environment

a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (Protection)

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Thing (IoT).
- Membangun ruang terbuka hijau
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi
- Mengendalikan polusi udara

b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (household)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (industrial)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (public)
- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (Energy)

- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab
- Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (environmentally friendly) dan berkelanjutan (sustainable) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017



BUKU I

**ANALISIS STRATEGIS SMART CITY
KOTA TANGERANG**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2017

